

## **Implementasi Program Ketahanan Pangan Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Tingkat Desa di Kabupaten Bogor**

Muhammad Sajidin<sup>1</sup>, Rezky Ramadhan Antuli<sup>2</sup>, Ester Lita Sareong<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

muh.sajidin@unsulbar.ac.id<sup>1</sup>, [rezky.ramadhanantuli@unsulbar.ac.id](mailto:rezky.ramadhanantuli@unsulbar.ac.id)<sup>2</sup>, ester@gmail.com<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*The central government through the village ministry issues policies to control inflation at the village level with various programs and activities that can be carried out by the village government, one of which is the food security program in the village, the focus of this research is the implementation of the food security program as an effort to control village level inflation in the district. Bogor with the aim of knowing the accuracy of the implementation of the food security program as an effort to control village level inflation based on various aspects according to the policy implementation theory of Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier (1983) descriptive research with a qualitative approach. In analyzing the implementation of the food security program as an effort to control village-level inflation, the author collected various data regarding the food security program which was carried out through literature reviews and interviews with the community and apparatus in several villages. The results showed that the implementation of the food security program as an effort to control village-level inflation had been implemented quite well. This can be seen from various measuring aspects, including problem characteristics, policy characteristics and the policy environment, where each aspect has various indicators that determine whether an aspect is fulfilled or not.*

*Keywords: program implementation, food security, village level inflation*

### **ABSTRAK**

Pemerintah pusat melalui kementerian desa mengeluarkan kebijakan untuk pengendalian inflasi ditingkat desa dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa, salah satunya adalah dengan program ketahanan pangan di desa, focus penelitian ini adalah implementasi program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi tingkat desa di kabupaten bogor ini dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan implementasi program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi tingkat desa berdasarkan berbagai aspek menurut teori implementasi kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis implementasi program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi tingkat desa, Penulis mengumpulkan berbagai data mengenai program ketahanan pangan yang dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara dengan masyarakat dan aparatur di beberapa desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi tingkat desa telah terimplementasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek pengukur, diantaranya adalah aspek karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan, dimana setiap aspek memiliki berbagai indikator yang menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu aspek.

*Kata Kunci: implementasi Program, Ketahanan Pangan, Inflasi tingkat desa*



## PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2021, arah pembangunan desa harus mengacu kepada sustainable development Goals atau SDGs Desa, yaitu sebagai upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus ada keterkaitannya dengan SDGs Desa sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang makmur sejahtera sesuai dengan tujuan disalurkannya dana desa dalam uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar mejadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Pemerintah Pusat melalui kementerian Desa telah membuat Kebijakan penggunaan dana desa tahun 2022 yang mengacu kepada peraturan menteri desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 dengan 3 fokus prioritas penggunaan dana desa yaitu, untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa (PD TT: 2022). Selain itu penggunaan dana desa tahun 2022 juga telah diatur dalam peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022, dimana dana desa diatur penggunaannya untuk memberikan perlindungan sosial berupa BLT desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dan dukungan pendanaan penanganan COVID 19 paling sedikit 8% dan sisanya untuk program sector prioritas lainnya seperti penanganan stunting di desa (Perpres 104: 2021).

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan Harga BBM sangatlah dirasakan oleh masyarakat tanpa terkecuali masyarakat di Desa, dengan pertimbangan yang matang akhirnya pemerintah mengambil kebijakan tersebut dengan alasan karena 70% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat yang mampu secara finansial, sehingga pemerintah mengalihkan subsidi tersebut dengan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada 20,65 Jt keluarga yang kurang mampu sebesar Rp. 150 ribu perbulan yang diberikan selama 4 Bulan (kompas.com: 2022). Dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat ketika naiknya BBM adalah harga sembako mengalami penyesuaian atau kenaikan, sehingga terjadinya inflasi atau meningkatnya harga-harga secara umum di pasaran hingga ketinggian desa.

Sebagai upaya untuk mengendalikan Inflasi di desa Pemerintah melalui kementerian desa PD TT RI telah mengeluarkan keputusan menteri desa PD TT RI Nomor 97 TAHUN 2022 tentang panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa, dalam pedoman tersebut mendorong agar pemerintah desa dengan segala kewenangannya untuk turut berperan aktif dalam mengendailkan inflasi di desa melalui kebijakan kegiatan yang dapat didanai melalui dana desa yang difokuskan agar harga barang dan jasa di desa tidak mengalami kenaikan.

Didalam keputusan menteri desa PD TT RI Nomor 97 Tahun 2022 tentang panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa disebutkan bahwa Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa dapat meliputi: 1. penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa, terutama pangan; 2. produksi komoditas dari dalam desa, terutama pangan dan energi; 3. kegiatan ekonomi terpadu mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi, serta daur ulang limbah untuk kebutuhan energi; 4. pengelolaan ketersediaan komoditas di Desa, terutama pangan dan energi; 5. bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani dan nelayan; 6. bantuan kepada unit usaha angkutan bahan pangan pada BUM Desa; 7.

penyiapan dan pengembangan pusat logistik di Desa; dan/atau 8. perdagangan online secara terbatas di dalam Desa atau kerja sama antar desa (PDTT: 2022).

Selain pengendalian, dalam Peraturan menteri tersebut juga diatur terkait mitigasi atau upaya mengurangi resiko dari inflasi tersebut yaitu Kegiatan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa yang meliputi: 1. padat karya tunai Desa, khususnya untuk warga miskin dan miskin ekstrem, pengangguran, perempuan kepala keluarga, berpenyakit kronis/menahun, dan kelompok marginal lainnya; 2. Penyaluran bantuan langsung tunai dana Desa kepada warga miskin dan miskin ekstrem yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya; 3. penyaluran dana bergulir masyarakat oleh BUM Desa Bersama LKD kepada warga miskin dan miskin ekstrem; dan/atau 4. program dan/atau kegiatan yang didanai dengan dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola (PDTT: 2022).

Kita ketahui bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional (bulog.co.id : 2022).

Menurut keputusan menteri desa nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa, disebutkan bahwa program ketahanan pangan di desa merupakan salah satu program sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di desa, selain itu program ini bertujuan mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga desa, dan memastikan desa terlepas dari kerawanan ketersediaan pangan (PDTT: 2022). Hal tersebut dilandasi dari Tingkat kelaparan Indonesia yang menurut Global Hunger Index (GHI) menempati urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara pada 2021. Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 18 poin atau termasuk dalam level moderat. Skor ini telah berada di atas rata-rata global yang sebesar 17,9 poin. GHI menggambarkan situasi kelaparan suatu negara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar fisiologis manusia, yaitu kebutuhan pangan dan nutrisi. Skor indeks GHI didasarkan pada empat komponen, yakni kondisi kurang gizi, anak yang kurus, *stunting* anak, dan kematian anak (databoks.katadata.co.id: 2021).

Dalam hal pengendalian inflasi ditingkat desa menurut menteri desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa Dana Desa dapat mengendalikan laju inflasi di tingkat Desa. Dalam hal ini, Dana Desa harus dimanfaatkan untuk mendukung percepatan komoditas pangan agar tercipta kesejahteraan dan kemakmuran di desa. Dengan demikian daya beli masyarakat terus meningkat dan harga-harga kebutuhan pokok stabil. Hadirnya Dana Desa pada pengendalian inflasi ini untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa di desa, dengan mempercepat produksi komoditas terutama pangan. Agar mencegah dampak inflasi, serta untuk menjaga daya beli warga desa, Dana Desa untuk percepatan produksi pangan harus dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan agar masyarakat desa memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan di desa secara mandiri dan diharapkan mampu mendukung kegiatan dari mulai produksi, penyediaan lahan dan infrastruktur penunjang, pengolahan dan pemasaran (kemendes.go.id: 2022).



Sebagai konsekuensi dengan munculnya kebijakan tersebut pemerintah desa harus merubah kebijakan penggunaan dana desa tahun 2022 melalui musyawarah desa khusus (MUSDESUS), karena dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah desa harus mereview lagi Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa tahun 2022, serta merubah kembali APBDES Tahun 2022. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan dalam hal SDM, dalam hal sistem dan mekanisme pelaksanaan serta keterbatasan waktu, ini menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Pemerintah desa harus melaksanakan sosialisasi kembali kegiatan yang akan dilaksanakan terkait program ini kepada masyarakat sehingga apa yang diharapkan dalam kebijakan pemerintah tersebut dapat tercapai.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Tamansari dan desa sirnagalih kecamatan tamansari kabupaten Bogor, Hasil penelitian akan dideskripsikan dengan menjelaskan variabel yang diteliti yaitu penelitian tentang Implementasi program Ketahanan Pangan desa dan upaya pengendalian inflasi di tingkat desa. Dengan sumber data dari informan yang terdiri dari Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, perangkat desa di desa tamansari dan desa sirnagalih. Lembaga kemasyarakatan desa dan kelompok masyarakat yang menerima bantuan ketahanan pangan dengan teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan Telaah Dokumen.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian (Creswell, 2009), Data yang terkumpul dapat berupa data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan beberapa dokumentasi kegiatan ketahanan pangan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati peneliti yang berpengaruh dengan fokus penelitian. Instrumen pengumpulan berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman telaah dokumen. Pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh data dari masing-masing objek untuk setiap fokus yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan dan menguraikan data yang didapat dari penelitian lapangan, kemudian dianalisis, diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis implementasi program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi di tingkat desa yang dilaksanakan di Desa Tamansari dan desa sirnagalih Kecamatan Tamansari yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2022, serta menganalisis dengan teori analisis kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengidentifikasi tiga berbagai aspek pengukur, diantaranya adalah aspek karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan, dimana setiap aspek memiliki berbagai indikator yang menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu aspek.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi program merupakan salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan oleh implementor yang menjadi subyek yang melaksanakan program ini adalah pemerintah desa, ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan

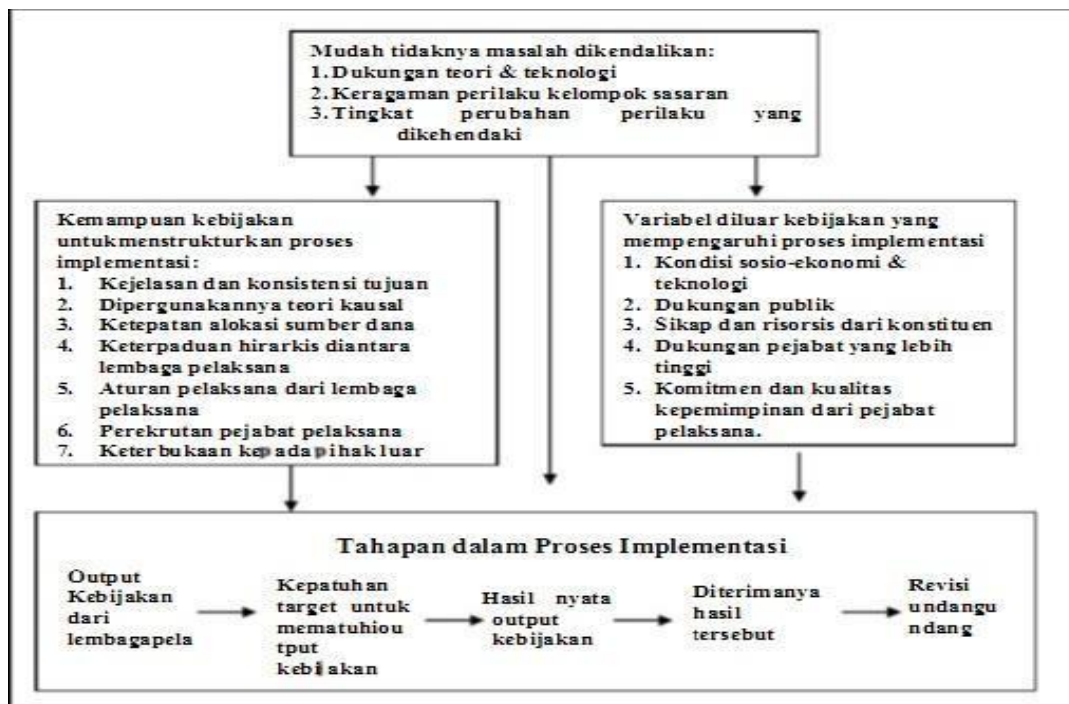


pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono: 2016). Implementasi program merupakan sebuah keniscayaan yang dapat diteliti dan diukur keberhasilannya, sesuai dengan pendapat, Grindle (1980) menyatakan bahwa, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Merilee S. (Ed): 1980).

Dalam hal kompleksitas implementasi program, tidak hanya ditunjukkan dari banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variable yang komplek, baik variable yang individual maupun variable organisasional, dan masing-masing variable saling berinteraksi satu sama lain. Seperti halnya dalam mengentaskan kemiskinan didesa, maka tidak cukup hanya pemerintah desa yang terlibat, tetapi juga melibatkan berbagai institusi seperti kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) Karakteristik dari masalah (tractability of the problems); (2) karakteristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to structure implementation) dan (3) variable lingkungan (Nonstatutory variables affecting implementation) (Subarsono: 2016).

Gambar 1. Variabel – Variabel yang mempengaruhi menurut Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A, 1983:22



### Variabel Karakteristik Masalah

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) indikator dari karakteristik masalah dalam mengimplementasikan program yang pertama adalah tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut dalam implementasi program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi tingkat desa



yang dilakukan oleh pemerintah desa tamansari dan desa sirnagalih dengan adanya kebijakan tersebut mengalami kesulitan untuk mengimplementasikannya, karena program ini merupakan program baru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan sosial dimasyarakat yang diakibatkan dari inflasi yaitu bertambahnya pengangguran dan kemiskinan di desa.

Selain itu variabel yang kedua dari karakteristik masalah dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi tingkat desa adalah tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut pemerintah desa mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan program dikarenakan kelompok masyarakat sasaran yang heterogen, sehingga tingkat pemahaman setiap kelompok masyarakat yang menjadi sasaran terhadap program yang akan dilaksanakan relative berbeda.

Indikator yang ketiga adalah proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut didapatkan data bahwa yang menjadi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran hanya beberapa persen dari jumlah populasi di desa tamansari dan desa sirnagalih, hal itu dikarenakan terbatasnya anggaran yang dialokasikan, yaitu sebesar 20% dari anggaran dana desa yang di transfer ke desa. Sehingga pemerintah desa melakukan musyawarah terkait penentuan kelompok sasaran yang akan di intervensi dalam program ketahanan pangan ini.

Indikator yang ke empat dari variabel karakteristik masalah adalah cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut pemerintah desa tamansari dan desa sirnagalih berharap dengan terlaksananya program ini inflasi di tingkat desa bisa dikendalikan sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di desa dan inflasi di tingkat desa bisa dikendalikan.

### ***Variabel Karakteristik Kebijakan***

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) indikator dari karakteristik Kebijakan dalam mengimplementasikan program yang pertama adalah kejelasan isi kebijakan, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan dana desa tahun 2022 yang diatur dalam peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022, dimana dana desa diatur penggunaannya untuk memberikan perlindungan sosial berupa BLT desa paling sedikit 40%, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dan dukungan pendanaan penanganan COVID 19 paling sedikit 8% dan sisanya untuk program sector prioritas lainnya seperti penanganan stunting di desa, peraturan menteri desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 dengan 3 fokus prioritas penggunaan dana desa yaitu, untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa. Selanjutnya untuk lebih detailnya pemerintah kabupaten bogor mengeluarkan peraturan bupati bogor nomor 63 tahun 2022 tentang tata cara pembagian, penetapan, penyaluran dan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, selain itu untuk pengendalian inflasi di desa, kementerian desa mengeluarkan keputusan menteri desa PDTT RI Nomor 97 Tahun 2022 tentang panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa disebutkan bahwa Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa, sehingga kejelasan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sangat jelas.

Indicator yang kedua dari variabel karakteristik kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait

indikator tersebut bahwa program ketahanan pangan sesuai dengan keputusan menteri desa nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa, disebutkan bahwa program ketahanan pangan di desa merupakan salah satu program sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di desa, selain itu program ini bertujuan mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga desa, dan memastikan desa terlepas dari kerawanan ketersediaan pangan.

Indicator yang ketiga dari variabel karakteristik kebijakan adalah besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut pemerintah melalui peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022, dimana pemerintah desa harus mengalokasikan anggaran untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari dana desa yang disalurkan ke desa, dengan persentase alokasi yang cukup besar tersebut diharapkan program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi tingkat desa bisa terimplementasi dengan baik.

Indicator yang keempat dari variabel karakteristik kebijakan adalah seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut bahwa pemerintah desa dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan di bantu oleh berbagai instansi seperti dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas peternakan dan dinas ketahanan pangan, instansi tersebut menjadi mitra pemerintah desa dalam bentuk fasilitasi pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar terlaksana dengan baik.

Indicator yang selanjutnya dalam variabel karakteristik kebijakan adalah tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut bahwa pemerintah desa telah berupaya untuk berkomitmen untuk melaksanakan program ketahanan pangan ini sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan dan disepakati dalam musyawarah desa.

Indicator yang terakhir dalam variabel karakteristik kebijakan adalah seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut bahwa pemerintah desa telah melaksanakan sosialisasi ini kepada pihak – pihak yang terkait seperti pihak kecamatan, dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas peternakan, kelembagaan masyarakat desa, tokoh masyarakat dan kelompok – kelompok masyarakat yang menjadi sasaran tuntut mendukung terlaksananya program ini dengan baik.

### ***Variabel Lingkungan Kebijakan***

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) indikator dari Lingkungan Kebijakan dalam mengimplementasikan program yang pertama adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. kebijakan, Berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut desa tamansari dan desa sirnagalih kecamatan tamansari menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Termasuk kategori desa maju, sehingga kualitas SDM sebagian warga desanya memiliki tingkat pendidikan yang menengah, artinya sudah bisa terbuka dengan kemajuan ilmu, teknologi dan informasi, hal tersebut akan membantu dalam keberhasilan mengimplementasikan program, karena program tersebut dapat disosialisasikan dengan mudah dan terbuka dalam pelaksanaannya.

Indikator yang kedua dari variabel Lingkungan kebijakan adalah dukungan public terhadap sebuah kebijakan, berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut bahwa program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tamansari dan sirnagalih di kecamatan tamansari dalam upaya pengendalian inflasi tingkat desa ini

mendapatkan dukungan dari berbagai elemen, mulai dari BPD, Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok tani, Kader Pembangunan Manusia, tidak terkecuali pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, karena program ini merupakan satu upaya untuk mengantisipasi ketersediaan pangan dan mengurangi angka kemiskinan di desa.

Indicator yang ketiga dari variabel lingkungan kebijakan adalah sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut bahwa program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tamansari dan sirnagalih di kecamatan tamasari bahwa sikap dari kelompok pemilih memberikan persetujuan dengan adanya program ketahanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai upaya pengendalian inflasi di tingkat desa, adapun sikap persetujuan dari kelompok pemilih tersebut berupa partisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan program ketahanan pangan dan melaksanakan fungsi control sosial agar program yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sesuai kebutuhan, tepat sasaran dan transparan.

Indicator yang terakhir dari variabel lingkungan kebijakan adalah tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor, berdasarkan pada hasil analisis data terkait indikator tersebut bahwa program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tamansari dan sirnagalih di kecamatan tamasari bahwa pemerintah desa sebagai implementor memiliki komitmen yang tinggi dalam merealisasikan program tersebut agar sesuai dengan ketentuan, sesuai kebutuhan, tepat sasaran dan transparan, sehingga membutuhkan partisipasi dari berbagai elemen untuk bersama-sama menjalankan program ini dengan baik sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam musyawarah desa dan mendukung upaya untuk pengendalian inflasi di desa.

Berdasarkan pada hasil analisis data terkait dengan implementasi program ketahanan pangan tahun 2022, Pemerintah desa tamansari dan pemerintah desa sirnagalih telah berupaya mengimplementasikan program ketahanan pangan diantaranya adalah pemberian bantuan kelompok ternak kambing, bantuan kelompok perikanan, bantuan kelompok bebek / itik, bantuan kelompok pertanian hidroponik. Sebelum melaksanakan program tersebut pemerintah desa melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak dengan tujuan mendapatkan saran dan masukan dan upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di wilayah desa tersebut dengan program ketahanan pangan khususnya untuk penanganan dan pengendalian inflasi di desa.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti berkesimpulan bahwa implementasi program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi di tingkat desa di kabupaten Bogor khususnya di desa tamansari dan desa sirnagalih telah dilaksanakan sesuai dengan 3 (Tiga) variabel implementasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) yaitu variabel Karakteristik dari masalah (*Tractability Of The Problems*), dari beberapa indikator dari variabel tersebut, pemerintah desa tamansari dan desa sirnagalih kecamatan tamansari, telah berhasil mengimplementasikan program dengan baik dapat dilihat dari proses yang dilalui melalui berbagai tahapan mulai dari menganalisis dan memahami lebih mendalam dari kebijakan yang ada, memetakan potensi dan masalah yang ada di desanya. Kemudian variabel dari karakteristik kebijakan/undang-undang (*Ability Of Statute To Structure Implementation*), dari berbagai pengamatan dari beberapa indikator dari variabel tersebut, pemerintah desa tamansari dan pemerintah desa sirnagalih kecamatan tamansari telah berhasil mengimplementasikan program dengan melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dengan melibatkan berbagai unsur untuk bersama-sama mensukseskan program ketahanan pangan di desa secara tepat sasaran dan transparan selain itu



keberhasilan dari program ketahanan pangan tersebut dilihat dari variable lingkungan (Nonstatutory variables affecting implementation).

Dari berbagai pengamatan dari beberapa indikator dari variabel tersebut, pemerintah desa tamansari dan pemerintah desa sirnagalih kecamatan tamansari telah berhasil mengimplementasikan program ketahanan pangan ini dengan menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga lebih mudah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, selain itu juga mendapatkan dukungan dari public yang sangat penting dalam melaksanakan program, sebagai fungsi control masyarakat yang memberikan pengawasan langsung terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dari beberapa variabel dan indicator dalam mengimplementasikan keberhasilan suatu program yang dilakukan oleh pemerintah desa telah berhasil melaksanakan program ketahanan pangan sebagai upaya pengendalian inflasi di tingkat desa, pemerintah desa telah berupaya untuk mempelajari, memahami dan melaksanakan program tersebut sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan dan sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan. Sebagai saran dari peneliti adalah program ini sangat relevan untuk pencapaian SDGs Desa yang pertama dan kedua yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan, sehingga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi stimulus bagi kemandirian ekonomi masyarakat di desa, terciptanya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan Potensi dan masalah yang ada di desa tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

Creswell, Jhon W. 2013. *RESEARCH DESIGN "Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches*. Third Edition. SAGE Publications. Thousand Oaks California  
Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press

Subarsono, A.G. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Cetakan ke-8*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 *tentang Rincian APBN 2022*  
Keputusan menteri desa PDTT RI Nomor 97 Tahun 2022 *tentang panduan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa*

Keputusan Menteri desa nomor 82 tahun 2022 *tentang pedoman ketahanan pangan di desa*

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/03/13590331/update-harga-bbm-hari-ini-pertalite-rp-10000-liter-solar-rp-6800-pertamax-rp>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/01/tingkat-kelaparan-indonesia-peringkat-tiga-tertinggi-di-asia-tenggara-pada-2021>

<https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/>